

**EVALUASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
PADA ANGKUTAN ANTAR KOTA
PALEMBANG-INDRALAYA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

**FADHILLAH DESRIANTY
NIM.07011381621114**

**ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2020**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

EVALUASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
PADA ANGKUTAN ANTAR KOTA
PALEMBANG-INDRALAYA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S1
Ilmu Administrasi Publik

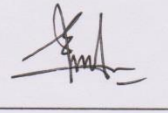
Oleh :

FADHILLAH DESRIANTY
NIM.07011381621114

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, Maret 2020

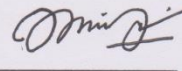
Pembimbing I

Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001



Pembimbing II

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Evaluasi Kebijakan Retribusi Perizinan Tertentu Pada Angkutan Antar Kota Palembang-Indralaya*" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 16 Mei 2020.

Palembang, 16 Mei 2020

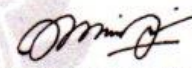
Ketua

1. Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001



Anggota

2. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002



3. Dr. Nurmah Semil, M.Si
NIP. 196712011992032002



4. Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

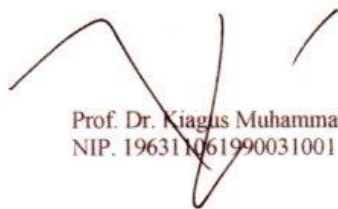


Mengetahui,
Dekan FISIP

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Orang yang pesimis selalu melihat kesulitan disetiap kesempatan, tapi orang yang optimis selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan

-Ali Bin Abi Thalib-

Tidak perlu pelit ilmu. Semua orang bisa memegang gitar yang sama, tidak semuanya akan memainkan lagu yang sama.

-Fiersa Besari-

Dengan rahmat dan ridho Allah SWT,
skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, ayahanda Rusdian dan ibunda Sri Suratmi
2. Adik saya ananda M. Fariz Deriansyah
3. Dosen dan pegawai FISIP Unsri
4. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik FISIP Unsri angkatan 2016

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Evaluasi Kebijakan Retribusi Perizinan Tertentu Pada Bus Antar Kota Palembang-Indralaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil Evaluasi Kebijakan Retribusi Perizinan Tertentu Pada Bus Antar Kota Palembang-Indralaya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan pada penelitian ini *CIPP Evaluation Model*, yang terdiri dari 4 dimensi yaitu *Context*, *Input*, *Process*, dan *Product* sebagai alat analisis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan daerah Sumatera Selatan nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu sudah berjalan cukup baik, namun belum berjalan secara maksimal dilihat dari tidak adanya tujuan tertulis untuk kebijakan ini, masih banyaknya PO ilegal yang beroperasi dilapangan, hukum bagi pelanggar masih lemah. Peneliti member saran agar dibuatnya tujuan khusus kebijakan retribusi perizinan tertentu secara tertulis, perlu adanya sosialisasi ulang mengenai kebijakan, tindak tegas bagi para pelanggar agar menimbulkan efek jera, dan pelatihan untuk seluruh SDM terkait.

Kata kunci : Evaluasi, kebijakan retribusi perizinan tertentu, Bus Antar Kota Dalam Provinsi, Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2012, Bus Palembang-Indralaya.

ABSTRACT

This research discusses the Evaluation of Certain Licensing Retribution Policies on the Palembang-Indralaya Inter-City Bus. The purpose of this research is to know the results of the Evaluation of Certain Licensing Retribution Policies on the Palembang-Indralaya Inter-City Bus. This research method uses qualitative research with a descriptive approach. Data collection techniques used in this study were library research and field research which included observations, interviews and documentation. The theory used in this study is the CIPP Evaluation Model, which consists of 4 dimensions, namely Context, Input, Process, and Product as an analysis tool. Based on the results of the study showed that the South Sumatra regional regulation number 5 of 2012 concerning certain licensing fees has been running quite well, but has not run optimally as seen from the lack of written objectives for this policy, there are still many illegal POs operating in the field, the law for violators is still weak . The researcher suggests that the specific objectives of certain licensing retribution policies be made in writing, there needs to be a re-socialization of the policy, decisive action for violators to have a deterrent effect, and training for all relevant HR.

Keywords: *Evaluation, certain licensing retribution policies, Inter-City Buses in Provinces, South Sumatra Regional Regulation Number 5 of 2012, Bus Palembang-Indralaya.*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan hamdalah kepada Allah SWT yang telah memberikan rizki kesempatan, kesehatan dan kreativitas, karena berkat rahmat dan anugrahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Evaluasi Kebijakan Retribusi Perizinan Tertentu Pada Bus Antar Kota Palembang-Indralaya” tepat waktu, sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Tidak lupa Shalawat kepada Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wassalam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini, mulai dari perancangan, pencarian bahan, sampai penulisan. Penulis mendapat bantuan, saran, petunjuk, dan bimbingan dari banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan FISIP UNSRI
2. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dan Pembimbing II Skripsi sayayang telah memberikan waktu untuk membimbing serta memberikan saran dan masukan untuk membantu penyusunan skripsi ini
3. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dan Pembimbing I Skripsi Saya yang telah memberikan waktu untuk membimbing serta memberikan saran dan masukan untuk membantu penyusunan skripsi ini
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, staf dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak/Ibu Pejabat dan seluruh pegawai Kantor Dinas Perhubungan Provinsi

Sumatera Selatan yang terlibat

6. Seluruh Teman-teman Administrasi Publik Angkatan 2016

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Namun, penulis sudah menyusun skripsi ini dengan sebaik dan semenarik mungkin sehingga pembaca tidak bosan dan ada pengetahuan baru yang didapat setelah membaca skripsi ini. Penulis tetap mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan penulisan selanjutnya.

Palembang, Mei 2020

(Fadhillah Desrianty)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.....	11
1. Definisi Kebijakan Publik.....	11
2. Definisi Evaluasi.....	12
3. Definisi Evaluasi Kebijakan.....	14
4. Definisi Perizinan.....	15
5. Definisi Transportasi Umum/ Kendaraan Umum.....	16
6. Riset Terdahulu.....	17
B. Teori Yang Digunakan.....	19
C. Kerangka Pemikiran.....	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	28
B. Definisi Konsep.....	29
C. Fokus Penelitian	30
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Informan Penelitian.....	34
F. Teknik Pengumpulan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data	35
H. Sistematika Penulisan.....	36

BAB IV

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
B. Evaluasi Kebijakan Retribusi Perizinan Tertentu Pada Angkutan Antar Kota Palembang-Indralaya.....	82
1. <i>Context Evaluation</i>	82
a) Lingkungan Kebijakan.....	83
b) Tujuan Kebijakan.....	85
2. <i>Input Evaluation</i>	87
a) Sumber Daya Manusia.....	88
b) Sumber Daya Fasilitas.....	94
c) Sumber Daya Anggaran.....	98
3. <i>Process Evaluarion</i>	100
a) Sosialisasi Kebijakan.....	100
b) Tahap Pelaksanaan.....	101
c) Tahap pengawasan.....	114
4. <i>Product Evaluation</i>	119
a) Keberhasilan	119
b) Dampak.....	121

BAB V

A. Kesimpulan.....	126
B. Saran.....	127

DAFTAR PUSTAKA.....	128
----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	130
----------------------	------------

DAFTAR TABEL

1. Daftar Perusahaan Transportasi Umum Palembang-Indralaya (Dari Unsri Bukit).....	3
2. Daftar Perusahaan Otobus Umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Di Kota Palembang.....	5
3. Riset Terdahulu.....	17
4. Kriteria Evaluasi.....	20
5. Fokus Penelitian.....	30
6. Daftar Nama Pegawai Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.....	91
7. Persyaratan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek.....	101
8. Pendapatan Retribusi daerah.....	120

DAFTAR GAMBAR

1. Angkutan Kota (Bukit-Ampera) yang Beroperasi Pada Trayek Palembang-Indralaya Unsri.....	3
2. Bus Trans Musi trayek Palembang-Indralaya Unsri.....	4
3. Bus Damri Trayek Palembang-Indralaya Unsri.....	4
4. Bus Koperasi Organda Kota Palembang AKDP Trayek Palembang-Indralaya Unsri.....	4
5. Kondisi Bus PT RJ2 Sriwijaya Indonesia.....	9
6. Kondisi Bus Angkutan Khusus.....	9
7. Model Evaluasi Kebijakan Menurut Leo Agustino.....	22
8. Kerangka Berfikir Menggunakan <i>CIPP Evaluation Model</i> Yang Diolah Oleh Penulis.....	27
9. Logo Dinas Perhubungan.....	41
10. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.....	44
11. Mesin Finger Print.....	89
12. Suasana Apel Pagi Di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.....	89
13. Contoh E-KP (Elektronik Kartu Pengawasan).....	93
14. Gedung Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.....	95
15. Data Aset Pada Ruang Bidang Angkutan Jalan.....	96
16. Suasana Ruang Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.....	97
17. Lemari Arsip Di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.....	97
18. Kegiatan Abdi Yasa Dishub Prov Sumsel 2019.....	99
19. SOP Izin Penyelenggaraan Angkutan AKDP.....	104
20. Lampiran PM 29 Tahun 2015 Tentang Standar Minimal Angkutan AKDP.....	106
21. Contoh KP (Kartu Pengawasan).....	115
22. Contoh Kartu Kir.....	116
23. Kartu Izin Usaha.....	117
24. Kegiatan Razia.....	118
25. Kondisi Beberapa Bus Yang Ada Di Terminal Unsri Indralaya.....	121
26. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 272/ KTSP/ DishubKominfo /2016.....	123

DAFTAR LAMPIRAN

1) Surat Tugas.....	131
2) Surat Keputusan Pembimbing Skripsi.	132
3) Surat Permohonan Izin Penelitian	133
4) Surat Balasan Izin Penelitian.....	134
5) Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Pembimbing I	135
6) Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Pembimbing II	136
7) Lembar Revisi Ujian Seminar Proposal	137
8) Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I.....	140
9) Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II.....	142
10) Lembar Revisi Skripsi.....	143
11) Pedoman Wawancara	146
12) Perda nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu.....	149

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

- 1. PO** : Perusahaan Otobus
- 2. AKDP** : Antar Kota Dalam Provinsi
- 3. AKAP** : Antar Kota Antar Provinsi
- 4. Trayek** : Jalan Yang Dilalui
- 5. BB** : Bus Besar
- 6. BK** : Bus Kecil
- 7. BS** : Bus Sedang
- 8. Efektif** : Tepat Pada Sasaran atau mempunyai akibat yang tepat
- 9. Efisien** : Mampu Menjalankan Tugas Dengan Tepat dan Cermat
- 10. Indikator** : Sesuatu yang Dapat Menjadi Petunjuk atau Keterangan
- 11. Inovasi** : Pemasukan Atau Pengenalan Hal-Hal yang Baru
- 12. Publik** : Orang Banyak atau Masyarakat
- 13. Variabel** : Faktor atau Unsur

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk mencapai lokasi tujuan dengan waktu yang produktif. Namun, akan menjadi masalah jika setiap manusia memiliki transportasi pribadi, maka pemerintah menyediakan jasa transportasi umum untuk menghindari masalah berupa kemacetan. Transportasi yang disediakan tidak hanya dalam ruang lingkup satu kota saja, ada beberapa perusahaan dibidang transportasi yang menyediakan jasa transportasi umum lintas kota bahkan lintas provinsi. Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat menuju tempat yang dituju dengan keadaan lalulintas yang nyaman.

Untuk menyediakan jasa tersebut perlu adanya perizinan agar perusahaan dapat beroperasi secara legal, dalam hal perizinan jasa transportasi khususnya Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) ini baik dari perusahaan transportasi BUMN, BUMD, maupun swasta semuanya ditangani oleh Dinas Perhubungan Provinsi.

Palembang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan maka tak heran jika jumlah penduduknya dapat dibilang cukup padat, sehingga kemacetan sudah menjadi teman bagi masyarakat di kota Palembang, tentunya transportasi umum sangat dibutuhkan guna mengurangi kemacetan yang ada. Jasa transportasi dikota Palembang dapat digunakan dari berbagai kalangan salah satunya yang menarik perhatian yaitu kalangan mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri) yang sangat membutuhkan jasa transportasi umum untuk menuju kampus yang berbeda kota yaitu di Palembang dan di Indralaya.

Untuk kebijakan mengenai perizinan jasa transportasi di daerah Provinsi Sumatera Selatan itu diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Perizinan Tertentu yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2012 adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Sedangkan untuk transportasi umum atau kendaraan umum yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2012 adalah setiap kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.

Transportasi yang digunakan oleh mahasiswa Unsri dengan trayek Palembang-Indralaya termasuk dalam golongan angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Dengan keadaan mahasiswa yang banyak tentu peran transportasi sangat berpengaruh, masalah ini dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk keuntungan pribadi yaitu dengan beroperasi pada trayek Palembang-Indralaya tanpa izin dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.

Tanpa adanya izin beroperasi tentu dapat membahayakan penumpang terkait dengan kelayakan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Meski sudah tersedianya transportasi legal oknum-oknum nakal membatasi jam operasi dari transportasi umum yang disediakan agar mahasiswa mau tidak mau menggunakan jasa mereka.

Harga dari transportasi setiap perusahaan juga berbeda dengan rute jalan yang berbeda juga. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1Daftar Perusahaan Transportasi Umum Palembang-Indralaya (dari Unsri Bukit)

No	Nama Transportasi Umum	Harga	Rute	Jam Operasi
1.	Damri (Perum Damri Stasiun Palembang)	Rp. 5000	Unsri Bukit - Unsri Indralaya (Melewati Jalan Tol)	06.00-10.00
2.	Trans Musi (PT. Trans Musi Palembang Jaya)	Rp. 8000	Unsri Bukit - Unsri Indralaya	06.00-10.00
3.	Angkutan Kota (Bukit-Ampera)	Rp. 15.000 – Rp. 20.000	Unsri Bukit - Unsri Indralaya	Pagi - Sore
4.	Koperasi Organda Kota Palembang	Rp. 8000	Unsri Bukit - Unsri Indralaya	Pagi (Hanya Keberangkatan Pertama)

Sumber: Data Lapangan Peneliti (Kampus Bukit)

Berikut dokumentasi terkait penampakan transportasi umum yang beroperasi pada trayek Palembang-Indralaya berdasarkan tabel diatas.

Gambar 1 Angkutan Kota (Bukit-Ampera) yang Beroperasi Pada Trayek Palembang-Indralaya Unsri



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 2 Bus Trans Musi Trayek Palembang-Indralaya Unsri



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 3 Bus Damri Trayek Palembang-Indralaya Unsri



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 4 Bus Koperasi Organda Kota Palembang AKDP Trayek Palembang-Indralaya Unsri



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Jika dilihat sekilas dari tabel diatas sudah sangat jelas transportasi umum Angkutan Kota (Bukit-Ampera) berstatus ilegal, karena trayek yang tertulis di mobil sudah jelas Bukit-Ampera bukan Palembang-Indralaya, ditambah salah satu dari syarat transportasi umum untuk AKDP pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Bab III Jenis Pelayanan Angkutan Bagian 4 Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi Pasal 43 ayat 3 poin a yang berbunyi:

“Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan Antarkota Dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. menggunakan Mobil Bus Tingkat, Mobil Bus Maxi, Mobil Bus Besar, dan/atau Mobil Bus Sedang untuk pelayanan ekonomi maupun pelayanan nonekonomi”

Sehingga sudah jelas bahwasanya jenis mobil Angkutan Kota (Bukit-Ampera) tidak memenuhi syarat dari Angkutan AKDP yang biasanya menggunakan mobil jenis kijang kapsul ataupun mobil phanter. Adapun Daftar Perusahaan Otobus Umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang terdata di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2 Daftar Perusahaan Otobus Umum Antar Kota Dalam Provisi (AKDP) di Kota Palembang (2019-2024)

NO	NAMA PO KETUA PO ALAMAT PO	NOMOR SK GUBERNUR MASA BERLAKU	JUMLAH		TRAYEK	
			ARMADA	JENIS KEND.		
1	2	3	4	5	6	
1	PO. ATUM EXPRESS M. Rizal Perum Talang Kelapa Blok. 9 No. 429 Rt. 50 Plg	No.788/KPTS/2014 30 Desember 2014 s/d 29 Desember 2019	26	23 2 1	BK : 2 BS : 17 BB : 7	Palembang - Sekayu - L. Linggau PP Palembang - Betung - Keluang PP Cadangan

2	PO. BANYUASIN Sudirman Jl. AKBP Umar 138 Palembang	No.423/KPTS/IV/2014 20 Juni 2014 s/d 20 Juni 2019	15	15	BK : - BS : 12 BB : 3	Palembang - S. Lilin - Bayung Lincir PP
3	CV. BAHTERA KARUNIA ILLAHI R. Zulfikri Aminuddin Jl. Pembangunan No. 2398 Ilir Barat I Palembang	No.0040/DPMPSTSP.V/I/2019 29 Januari 2019 s/d 29 Januari 2024	6	6	BK : - BS : 6 BB : -	Palembang- Prabumulih-Muara Enim-Lahat-Tebing Tinggi PP
4	CV. BATANG HARI WISATA H. Zakaria Karim Jl. TP. Rustam Effendi No. 35 Palembang	No. 266/PTSP- BP3MD/VI/2016 21 Juni 2016 s/d 21 Juni 2021	32	9 8 3 10 2	BK : 29 BS : 3 BB : -	Palembang- Prabumulih-Baturaja- M.Dua-Ranau Palembang - Prabumulih - Baturaja - Martapura PP Palaembang - K. Agung - P. Panggang PP Baturaja - Palembang - Sekayu - L. Linggau PP Baturaja - M. Enim - Lahat - L. Linggau PP
5	KOPERASI ORGANDA KOTA PALEMBANG Sunir Hadi Palembang	No. 261/DPMPSTSP.V/VII/2017 17 Juli 2017 s/d 17 Juli 2022 No. 0456/DPMPSTSP.V/VII/019 15 Juli 2019 s/d 15 Juli 2024	8 24	8	BK : - BS : 2 BB : 6 BK : - BS : 3 BB : 21	Term. Karya Jaya Palembang - Indralaya PP Term. Karya Jaya Palembang - Indralaya PP
6	CV. MARKAS H. Kasmir Hambali Jl. Maluku Blok D Seberang Ulu I Palembang	No. 241/PTSP- BP3MD/VI/2016 7 Juni 2016 s/d 7 Juni 2021	22	1 9 12	BK : - BS : 22 BB : -	Palembang - Cengal PP Plg (Plaju) - Sp. Rambutan - Sp. Padang - T. Selapan PP Palembang (Plaju) - Rambutan - Sp. Padang PP
7	PERUM DAMRI STASIUN	No.730/KPTS/IV/2013	4	4	BK : -	Pel. Tanjung Api-api - Term. Alang-alang Lebar

	PALEMBANG	8 Oktober 2013 s/d			BS : -	
	Indra Darmawan Palembang	8 Oktober 2018			BB : 4	
	Penambahan Kendaraan	No.78/KPTS/DISKOM/2015	9	9	BK : -	Pel. Tanjung Api-api - Term. Alang-alang Lebar
		19 Januari 2015 s/d			BS : -	
		18 Januari 2020			BB : 9	
		438/PTSP-BP3MD/XII/2017	20	5	BK : -	Term. Jaka Baring Palembang - Prabumulih PP
		9 Desember 2017 s/d		5	BS : -	Term. Jaka Baring Palembang - Indralaya PP
		9 Desember 2022		5	BB : 20	Term. Jaka Baring Palembang - Kayu Agung PP
				5		Term. Alang-alang Lebar Palembang - Pangkalan Balai PP
8	PO. PERMATA HIJAU	No.381/KPTS/DISKOM/2015	5	5	BK : 5	Palembang - Prabumulih - M. Enim - Lahat - Pagar Alam - Empat Lawang - Tebing Tinggi - Lubuk Linggau PP
	RM. Nasir Amiruddin	15 maret 2015 s/d			BS : -	
	Palembang	15 Maret 2020			BB : -	
9	PT.TRANS MUSI PALEMBANG JAYA	No.053/DPMPPTSP.V/II/2018	15	15	BK : -	Palembang -Indralaya PP
		9 Februari 2018 s/d			BS : -	
	Ir. Bahder Johan Komp. PTC Mall Blok G No. 48 Palembang	9 Februari 2023			BB : 15	
10	PT. TITISAN SANG PANGERAN	No. 339/PTSP- BP3MD/VIII/2016	5	5	BK : 5	Palembang - Prabumulih - Baturaja - Muara Dua -
	Yesie Aryanti Jl. Letnan Lr. Biga No. 880 22 Kec. Ilir Timur I Palembang	24 Agustus 2016 s/d			BS : -	Rantau PP
		24 Agustus 2021			BB : -	
11	PT. JAYA UTAMA SARANA	No. 387/PTSP- BP3MD/VIII/2016	5	5	BK : -	Term. Alang-alang Lebar - Pelabuhan Tj. Api-api PP
	Mieke Dwinovi, SE Jl. Sultan Mahmud Badarudin II	28 Oktober 2016 s/d			BS : 5	
		28 Oktober 2021			BB : -	

No. 20-21 Km. 12 Palembang						
-------------------------------	--	--	--	--	--	--

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan

Keterangan:

- BK (Bus Kecil) : Daya Angkut 9-16 Orang
- BS (Bus Sedang) : Daya Angkut 17-28 Orang
- BB (Bus Besar) : Daya Angkut Lebih dari 28 Orang

Dari tabel Daftar Perusahaan Otobus Umum Antar Kota Dalam Provisi (AKDP) di Kota Palembang (2019-2024) diatas terdapat 3 Perusahaan Otobus (PO) yang memiliki izin beroperasi pada trayek Palembang-Indralaya yaitu:

1. Koperasi Organda Kota Palembang
2. Perum Damri Stasiun Palembang
3. PT. Trans Musi Palembang Jaya

Dengan adanya data diatas semakin terlihat ke-ilegalan dari transportasi umum Angkutan Kota (Bukit-Ampera) yang beroperasi pada trayek Palembang-Indralaya. Sedangkan diluar tabel itu, transportasi umum mahasiswa Unsri Indralaya masih banyak didapati bus yang tidak terdaftar pada tabel diatas salah satunya adalah bus PT RJ2 Sriwijaya Indonesia dan bus Angkutan Khusus namun dengan kondisi yang bisa dikatakan tidak layak beroperasi terlihat dari bus yang rapuh dan ada beberapa bagian badan bus yang berkarat namun tetap beroperasi pada Unsri Indralaya. Berikut dokumentasi terkait kondisi badan bus yang berkarat dan penuh tampalan.

Gambar 5 Kondisi Bus PT RJ2 Sriwijaya Indonesia



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 6 Kondisi Bus Angkutan Khusus



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Berkaitan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang mengatur tentang perizinan operasi transportasi umum menimbulkan pertanyaan, mengapa bisa ada perusahaan otobus yang beroperasi tanpa mendapatkan izin? Apakah terdapat masalah dalam proses perizinan? Atau masalah pribadi perusahaan yang tak mau diatur? Selain itu kebijakan sudah berjalan lebih dari 5 tahun jadi perlu adanya evaluasi kebijakan untuk melihat apakah sudah berjalan sesuai harapan, serta perusahaan transportasi

apa saja yang telah atau masih mendapatkan izin beroperasi lintas kota, sehingga dapat memberikan solusi dari masalah PO yang ilegal.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Evaluasi Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Pada Angkutan Antar Kota Palembang-Indralaya?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuannya Untuk Mengetahui HasilEvaluasi Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Pada Angkutan Antar Kota Palembang-Indralaya.

Manfaatnya terdapat manfaat teoritis serta manfaat praktis, manfaat teoritis:

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam pembuatan atau perbaikan pada kebijakan selanjutnya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan bagaimana cara mengantisipasi oknum-oknum nakal dari kasus ini.

Manfaat Praktis:

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan pengetahuan atau referensi bagi Mahasiswa yang ingin meneliti dalam ruang lingkup perizinan transportasi.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi contoh yang dapat diberikan dosen pada mahasiswa dikelas.
3. Hasil penelitian ini diharapkan bisa diterapkan di kampus khususnya Unsri untuk meminimalisir oknum-oknum nakal yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustino, Leo, 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung:Alfabeta
- Agustino, Leo, 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung:Alfabeta
- Agustino, Leo, 2017. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung:Alfabeta
- Akbar, Muh Firyal dan Widya Kurniati Mohi. 2018. Study Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia). Gorontalo: Ideas Publishing
- Anderson, James E, 1984, *Public Policy Making*, New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Denzin, Norman K dan Yvonna S. Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pengajar.
- Dunn, William N.2013. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy*. Jakarta: Pt Gramedia.
- Philipus, M Hadjon, 1993. Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya: Yuridika.
- Stufflebeam, D.L & Shinkfield, A.J. 1985. *Systematic Evaluation: a instructional guide to theory & practice*. Boston: Klower-nijhoff publishing.
- Sugiyono.2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. Administrasi Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik, teori, proses dan studi kasus. Jakarta: CAPS. PT. Buku Seru.

SKRIPSI

- Firnando, Doni. 2019. Evaluasi Kebijakan Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2016 Tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017. Skripsi tidak diterbitkan. Indralaya: Ilmu Administrasi Publik UNSRI

Akbar. 2019. Evaluasi Implementasi Kebijakan Wajib Baca Tulis Al-Qur'an Pada Sekolah Menengah Pertama Di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. Skripsi tidak diterbitkan. Indralaya: Ilmu Administrasi Publik UNSRI

JURNAL

Mansur. 2019. Evaluasi Kebijakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Di Kabupaten Mamuju Utara. E Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 4, April 2016 Hlm 146-155. Palu: Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Safores, Defkendri Novaldi. 2016. Evaluasi Kebijakan Retribusi Perizinan Tertentu (Studi Izin Trayek Di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu). JOM FISIP Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016. Pekan Baru: Ilmu Pemerintahan Universitas Riau

KEBIJAKAN

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 29 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bertmotor Umum Dengan Trayek